

Analisis Partisipasi Pemangku Kepentingan dalam Pembangunan Desa Inovasi: Studi Kasus Pulau Raam

Hendra Poltak¹, Ismail², Handayani³, Endang Gunaisah⁴, Daniel Heintje Ndahawali⁵, Muhfizar⁶

^{1,2,3,4,5,6}Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong

Email: hendra.poltak@polikpsorong.ac.id

Article History

Received: 7-7-2024

Revised: 27-7-2024

Published: 6-8-2024

Keyword: Innovation Village, Stakeholder Participation, Village Development, Raam Island, Fisheries Sector

Abstract: Development is the result of government activities and programs designed for the community to achieve well-being. Development involves three main parties: the state, the community, and the private sector, each playing a proportional role in their participation. This study aims to analyze stakeholder participation in the development of the Raam Island Innovation Village, Sorong City. Using a qualitative approach, this research involved two sessions of Focus Group Discussions (FGD) with a total of 50 participants representing various community elements and stakeholders, as well as in-depth interviews and field observations. The results of the study indicate that active multi-stakeholder participation is a key factor in village development efforts. Five main issues faced by the fishing community were identified: the need for fisherman's cards, inadequate electricity infrastructure, limited fishing equipment, difficulties in obtaining ice blocks, and challenges in marketing and product legality. This research reveals potential collaborative solutions involving local government, the private sector, and educational institutions. The role of fisheries extension officers as facilitators among stakeholders has proven important in implementing solutions. Although Raam Island has great potential in the fisheries and tourism sectors, the development of these two sectors is still not optimal. In conclusion, the development of the Raam Island Innovation Village requires a holistic and integrated approach, as well as sustainable coordination mechanisms among stakeholders to address challenges and optimize the village's potential.

Kata Kunci:

Desa Inovasi, Partisipasi Pemangku Kepentingan, Pembangunan Desa, Pulau Raam, Sektor Perikanan

Abstrak: Pembangunan adalah hasil kegiatan dan program pemerintah yang dirancang untuk masyarakat mencapai kesejahteraan. Pembangunan melibatkan tiga pihak utama yakni, negara, masyarakat, dan swasta yang proporsional dalam menjalankan peran partisipasinya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis partisipasi pemangku kepentingan dalam pembangunan Desa Inovasi Pulau Raam, Kota Sorong. Menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini melibatkan dua sesi Focus Group Discussion (FGD) dengan total 50 partisipan yang mewakili berbagai elemen masyarakat dan pemangku kepentingan, serta wawancara mendalam dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi aktif multi-stakeholder merupakan faktor kunci dalam upaya pembangunan desa. Teridentifikasi lima masalah utama yang dihadapi komunitas nelayan: kebutuhan kartu nelayan, infrastruktur listrik yang belum memadai, keterbatasan alat penangkapan, kesulitan mendapatkan es balok, serta tantangan pemasaran dan legalitas produk. Penelitian ini mengungkapkan potensi solusi kolaboratif yang melibatkan pemerintah daerah, sektor swasta, dan lembaga pendidikan. Peran penyuluh perikanan sebagai fasilitator antar pemangku kepentingan terbukti penting dalam implementasi solusi. Meskipun Pulau Raam memiliki potensi besar di sektor perikanan dan pariwisata, pengembangan kedua sektor ini masih belum optimal. Kesimpulannya, pembangunan Desa Inovasi Pulau Raam membutuhkan pendekatan holistik dan terintegrasi, serta mekanisme koordinasi berkelanjutan antar pemangku kepentingan untuk mengatasi tantangan dan mengoptimalkan potensi desa.

PENDAHULUAN

Desa adalah tempat penting di mana kemajuan ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia dimulai (Sukri *et al.*, 2023). Desa-desa di Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi motor penggerak pembangunan nasional karena kekayaan alam yang



melimpah dan tradisi lokal yang kaya (Kusumaputra, 2017). Oleh karena itu, pembangunan desa haruslah menjadi prioritas (Nikmatul Masrurroh & Parnomo, 2018). Penduduk desa yang sebagian besar bergantung pada sektor pertanian maupun perikanan serta kerajinan tradisional juga memiliki peluang besar untuk meningkatkan taraf hidup mereka melalui inovasi dan dukungan pemerintah. Selain itu, keunikan budaya dan kearifan lokal yang dimiliki oleh desa-desa tersebut dapat menjadi daya tarik wisata yang mendatangkan manfaat ekonomi. Upaya mendatangkan manfaat ekonomi desa, partisipasi aktif dari pemangku kepentingan menjadi kunci keberhasilan pembangunan desa (Akbar et al., 2018; Hardianti, 2017; Septia & Pebriyenni, 2019).

Salah satu tantangan utama dalam pembangunan desa adalah kurangnya partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa partisipasi aktif dari pemangku kepentingan menjadi kunci keberhasilan pembangunan desa (Akbar et al., 2018; Hardianti, 2017; Septia & Pebriyenni, 2019). Namun, masih terdapat kesenjangan pengetahuan tentang bagaimana mengoptimalkan partisipasi tersebut, terutama dalam konteks desa kepulauan seperti Pulau Raam di Kota Sorong.

Pulau Raam memiliki potensi besar dalam sektor perikanan dan pariwisata. Sebagian besar penduduknya bekerja sebagai nelayan tradisional yang menangkap berbagai jenis ikan, terutama tuna (Ismail et al., 2021; Ratna et al., 2023). Selain itu juga Pulau Raam memiliki potensi besar pariwisata pantai dan laut (Kombongan, 2017). Namun, belum ada penelitian komprehensif yang menganalisis bagaimana partisipasi pemangku kepentingan dapat dioptimalkan untuk mengembangkan Pulau Raam sebagai desa inovasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis partisipasi pemangku kepentingan dalam pembangunan Desa Inovasi Pulau Raam.

METODOLOGI

Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Pulau Raam, Distrik Sorong Kepulauan, Kota Sorong, dari tanggal 29 Februari 2021 s.d 9 Juni 2021. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian yang menghasilkan temuan-temuan yang tidak dapat diperoleh melalui prosedur statistik atau metode kuantitatif lainnya (Sujarweni, 2020). Pengumpulan data dilakukan dengan cara *Focus Group Discussion* (FGD) yang dilaksanakan selama 2 sesi FGD.

Data diperoleh dari partisipan yang terdiri dari perwakilan pemerintah daerah, institusi pendidikan, perusahaan, dan komunitas lokal. Pemangku kepentingan utama termasuk Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong, Dinas Perikanan Kota Sorong, dan beberapa perusahaan lokal. Teknik purposive sampling digunakan untuk memilih partisipan FGD. Partisipan dipilih berdasarkan peran dan relevansi mereka dalam pembangunan desa inovasi di Pulau Raam. Focus Group Discussion (FGD): Dua sesi FGD dilakukan untuk mengumpulkan pandangan dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Hasil FGD Pertama:

Untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai potensi dan kendala di Pulau Raam, penelitian ini menggunakan metode Focus Group Discussion (FGD). FGD pertama melibatkan 30 peserta yang mewakili berbagai elemen masyarakat, termasuk pengolah hasil perikanan, nelayan, tokoh agama, tokoh pemuda, dan aparatur pemerintah. Keragaman ini memastikan representasi yang luas dari berbagai perspektif dalam komunitas.

Metodologi FGD dirancang untuk memaksimalkan partisipasi dan efektivitas diskusi. Peserta dibagi menjadi tiga kelompok, masing-masing didampingi oleh seorang fasilitator dari tim peneliti. Fasilitator berperan penting dalam memandu diskusi, memastikan semua suara didengar, dan menjaga fokus pada topik yang telah ditentukan Cornwall & Jewkes (1995).

Proses FGD terdiri dari tiga tahap utama: 1) Diskusi kelompok untuk mengidentifikasi potensi dan kendala, 2) Presentasi hasil diskusi kelompok, dan 3) Diskusi pleno untuk integrasi ide dan solusi. Struktur ini memungkinkan artikulasi ide yang mendalam dalam kelompok kecil, serta sintesis dan validasi dalam forum yang lebih besar. Hasil FGD dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Hasil FGD

Kelompok I	Kelompok II	Kelompok III
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan karamba ikan campuran/jaring tali ukuran ½ S. 2. Pengembangan untuk ikan/Lobster, teripang dan penerangan untuk tambak. 3. Pembuatan talud untuk pengamanan perahu. 4. Harga pasar tuna yang masih minim. 5. Kendala es balok yang susah didapat 6. Pengembangan wisata pantai dan pengembangan homestay/penginapan 7. Kartu nelayan dan kartu asuransi nelayan 8. Tingkatkan listrik di desa. 9. Pengembangan ikan kerapu 	<ol style="list-style-type: none"> a. Permasalahan Abon : <ol style="list-style-type: none"> 1. Lebih dari 30% ikan hasil pengolahan abon tidak termanfaatkan, 2. Pemasaran, Legalitas, (PIRT) dari dinas Kesehatan, alat pres pengeringan abon, dan pelatihan abon yang benar. 3. Ijin pembuatan badan hukum koperasi dari notaris (menjadi kendala pembiayaannya) untuk dijadikan KUD 4. Listrik/Jaringan Internet b. Permasalahan Pembuatan Fiber <ol style="list-style-type: none"> 1. Transportasi Bahan 2. Listrik selama ini menggunakan genset sehingga boros anggaran 3. Keterlambatan pengiriman alat dan bahan sehingga menghambat produksi fiber glass 4. Pemasaran produk 5. Kurangnya modal usaha 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kendala wilayah adat. 2. Surat Izin Mencari Hasil tangkapan. 3. Alat Bantu Penangkapan Ikan (GPS). 4. Kartu Nelayan 5. Jeti Boat Pendaratan Kapal/Perahu. 6. Nelayan lobster masih menggunakan kompresor untuk menangkap 7. Aktivitas warga belum dapat disupport sepenuhnya oleh listrik 8. Belum ada penangkal ombak 9. Perlu adanya transpalasi karang

	<p>6. Limbah bahan sisa pembuatan fiber</p> <p>c. Masalah Jaring Penangkapan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya fasilitas alat bantu penangkapan 2. Standar keselamatan di atas perahu 3. Kartu nelayan 4. Alat komunikasi 5. Alat penyimpanan ikan Ketika ikan banjir <p>d. Masalah penangkapan tuna :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mahalnya BB (tidak ada kartu nelayan) 2. Standar harga pembelian murah 3. Es balok terkendala dalam penangkapan ikan yang jauh 4. Alat penangkapan 5. Pelabuhan untuk nelayan 	
--	--	--

Berdasarkan hasil FGD yang telah dilakukan, teridentifikasi beberapa masalah utama yang dihadapi oleh komunitas nelayan di daerah tersebut. Pembahasan ini akan menganalisis lima masalah utama tersebut dengan merujuk pada literatur dan penelitian terkait.

1. Kartu Nelayan:

Pentingnya kartu nelayan yang disoroti oleh semua kelompok mencerminkan kebutuhan akan identifikasi formal dan pengakuan profesi nelayan. Menurut (Fajriando, 2015), kartu nelayan berfungsi sebagai instrumen kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui akses yang lebih baik ke berbagai program pemerintah. Kartu ini memungkinkan nelayan untuk mendapatkan bantuan kapal dan alat tangkap, akses ke BBM bersubsidi dan asuransi (Kiswanto & Andi, 2017; Pioh et al., 2020). Komponen-komponen ini sangat dibutuhkan oleh nelayan dalam menjalani profesinya.

2. Listrik:

Kebutuhan akan infrastruktur listrik yang memadai mencerminkan pentingnya energi dalam mendukung pembangunan ekonomi pedesaan. (Akhmadi & Priastawa, 2021; Sapthu, 2023) menegaskan bahwa akses listrik yang andal dapat meningkatkan produktivitas, memungkinkan diversifikasi ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup di daerah pedesaan. Dalam konteks komunitas nelayan, listrik tidak hanya penting untuk kehidupan sehari-hari, tetapi juga untuk mendukung rantai dingin dalam pengawetan ikan dan pengolahan produk perikanan (Paulina Sulas, 2022).

3. Alat Penangkapan:

Kekurangan alat bantu penangkapan dan alat keselamatan menunjukkan adanya kesenjangan teknologi dan keamanan dalam praktik penangkapan ikan. Menurut (Arleiny

et al., 2023), akses ke teknologi yang tepat dapat meningkatkan efisiensi penangkapan dan mengurangi risiko kecelakaan di laut. Penggunaan GPS dan alat komunikasi modern, misalnya, dapat meningkatkan keselamatan nelayan dan efisiensi operasi penangkapan ikan (Tasmil, 2015; Tedyyana et al., 2023).

4. Es Balok:

Kesulitan dalam mendapatkan es balok untuk pengawetan ikan merupakan masalah serius yang dapat mempengaruhi kualitas dan nilai ekonomi hasil tangkapan. (Larasati et al., 2024; Pertiwi & Handayani, 2023) menekankan bahwa manajemen rantai dingin yang efektif sangat penting untuk mengurangi kerugian pasca panen dan mempertahankan kualitas ikan. Keterbatasan akses ke es dapat mengakibatkan penurunan kualitas ikan yang signifikan (Syafitri et al., 2016).

5. Pemasaran dan Legalitas Produk:

Masalah pemasaran dan legalitas produk olahan ikan mencerminkan tantangan yang dihadapi nelayan dalam meningkatkan nilai tambah hasil tangkapan mereka. Anam et al., (2023) menyoroti pentingnya sertifikasi produk, seperti PIRT, dalam meningkatkan kepercayaan konsumen dan akses pasar. Sementara itu, pembentukan koperasi dapat membantu nelayan dalam mengakses modal dan memperkuat posisi tawar mereka di pasar (Arifandy et al., 2020).

Analisis Hasil FGD Kedua:

FGD kedua dilaksanakan pada 9 Juni 2021, melibatkan 20 peserta dari berbagai pemangku kepentingan seperti termasuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sorong, Dinas Perikanan Kota Sorong, Biro Klasifikasi Indonesia, Indopapua Sorong, Citra Rajaampat Canning, Perikanan Nusantara, IMPD/WIFI, BNJ, dan MOW. Tujuan FGD ini adalah untuk memperoleh interaksi data dan responden terkait dengan isu-isu yang diangkat pada FGD pertama serta mencari solusi untuk masalah yang ada.

Masalah Utama yang Diidentifikasi:

1. Kekurangan Pasokan BBM:

Dinas Perikanan berkomitmen untuk memindahkan outlet BBM dari jembatan puri ke Pulau Raam untuk memudahkan akses nelayan dalam mendapatkan BBM. Akses yang lebih mudah ke BBM diharapkan dapat mengurangi biaya operasional nelayan dan meningkatkan efisiensi penangkapan ikan.

2. Pemasaran Ikan Tuna:

PT. Caning bersedia membeli ikan tuna dari nelayan Pulau Raam dengan syarat status perizinan dan surat kapal lengkap. Hal ini menunjukkan adanya potensi pasar yang siap menerima hasil tangkapan nelayan, namun juga menyoroti pentingnya kepatuhan terhadap regulasi perizinan kapal.

3. Kendala Pasokan Es:

PT. IMPD berkomitmen untuk mendukung penyelesaian masalah kurangnya pasokan es bagi nelayan. Pasokan es yang memadai sangat penting untuk menjaga kesegaran ikan, terutama tuna, hingga sampai ke pasar.

4. Pasokan Bahan Baku Fiber:

PT. Indopapua akan berupaya untuk melancarkan suplai bahan baku fiber. Bahan baku fiber penting untuk pembuatan perahu dan alat tangkap yang lebih modern dan efisien.

5. Penyuluh perikanan

Penyuluh perikanan melakukan pendampingan dan menjadi jembatan antara pemangku kepentingan untuk mengimplementasikan solusi yang telah diidentifikasi

Partisipasi Pemangku Kepentingan:

Hasil FGD pertama dan kedua menunjukkan adanya partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan dalam upaya pembangunan Desa Inovasi di Pulau Raam. Partisipasi ini mencerminkan pendekatan kolaboratif yang penting dalam pembangunan desa (Akbar et al., 2018; Septia & Pebriyenni, 2019).

Masyarakat Lokal:

Partisipasi masyarakat lokal terlihat jelas dalam FGD pertama, di mana berbagai elemen masyarakat (pengolah hasil perikanan, nelayan, tokoh agama, tokoh pemuda, dan aparatur pemerintah) terlibat aktif dalam mengidentifikasi potensi dan kendala di desa mereka. Hal ini sejalan dengan prinsip pembangunan partisipatif yang menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan (Hardianti, 2017).

Pemerintah Daerah:

Keterlibatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sorong dan Dinas Perikanan Kota Sorong dalam FGD kedua menunjukkan peran penting pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan desa. Komitmen Dinas Perikanan untuk memindahkan outlet BBM ke Pulau Raam mencerminkan responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat, sesuai dengan peran pemerintah dalam menyediakan infrastruktur yang dibutuhkan (Kusumaputra, 2017).

Sektor Swasta:

Partisipasi perusahaan seperti PT. Caning, PT. IMPD, dan PT. Indopapua dalam FGD kedua menunjukkan potensi kolaborasi antara sektor swasta dan masyarakat desa. Kesiediaan perusahaan-perusahaan ini untuk membeli hasil tangkapan, menyediakan es, dan memasok bahan baku fiber mencerminkan peran sektor swasta dalam mendukung ekonomi lokal (Mulyana et al., 2017).

Lembaga Pendidikan:

Keterlibatan Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong, meskipun tidak dijelaskan secara rinci dalam hasil FGD, menunjukkan potensi kontribusi lembaga pendidikan dalam memberikan dukungan teknis dan pengetahuan kepada masyarakat desa. Peran ini sesuai dengan konsep triple helix (pemerintah-swasta-akademisi) dalam pembangunan daerah (Etzkowitz & Leydesdorff, 2000).

Penyuluh Perikanan:

Peran penyuluh perikanan sebagai fasilitator dan jembatan antara pemangku kepentingan menunjukkan pentingnya mediator dalam proses pembangunan partisipatif. Hal ini sejalan dengan temuan Mitra (2021) tentang peran kunci penyuluh dalam pemberdayaan masyarakat pesisir.

Partisipasi multi-stakeholder ini mencerminkan pendekatan holistik dalam pembangunan Desa Inovasi, di mana berbagai pemangku kepentingan berkontribusi sesuai dengan kapasitas dan peran mereka masing-masing. Namun, untuk memastikan keberlanjutan partisipasi ini, perlu adanya mekanisme koordinasi dan komunikasi yang berkelanjutan antar pemangku kepentingan, serta evaluasi berkala terhadap efektivitas kontribusi masing-masing pihak.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan memainkan peran krusial dalam upaya pembangunan Desa Inovasi di Pulau Raam. Melalui serangkaian Focus Group Discussion (FGD) dan wawancara mendalam, teridentifikasi beberapa masalah utama

yang dihadapi oleh komunitas nelayan, meliputi kebutuhan kartu nelayan, infrastruktur listrik yang belum memadai, keterbatasan alat penangkapan ikan, kesulitan mendapatkan es balok, serta tantangan dalam pemasaran dan legalitas produk olahan ikan. Penelitian ini mengungkapkan adanya potensi solusi kolaboratif untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, yang melibatkan komitmen dari pemerintah daerah, sektor swasta, dan lembaga pendidikan. Peran penyuluh perikanan sebagai fasilitator dan jembatan antar pemangku kepentingan juga terbukti sangat penting dalam implementasi solusi yang telah diidentifikasi. Meskipun Pulau Raam memiliki potensi besar dalam sektor perikanan dan pariwisata, pengembangan kedua sektor ini masih belum optimal dan memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Untuk memastikan keberlanjutan partisipasi pemangku kepentingan dan efektivitas pembangunan Desa Inovasi, diperlukan mekanisme koordinasi dan komunikasi yang berkelanjutan, serta evaluasi berkala terhadap kontribusi masing-masing pihak.

REFEERENSI

- Akbar, M. F., Suprpto, S., & Surati, S. (2018). Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Desa Jatimulya Kabupaten Boalemo. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 6(2), 135–142.
- Akhmadi, H., & Priastawa, P. N. (2021). Analisis Manfaat Penyertaan Modal Negara Pada Program Pembangunan Infrastruktur Listrik Desa Provinsi Bali. *Bina Ekonomi*, 25(1), 8–22.
- Anam, M. K., Alvianti, R., Zainuddin, M., Syakur, A., Khalik, J. A., Anam, C., & Sariati, N. P. (2023). Sosialisasi Program Sertifikasi Halal untuk Meningkatkan Kepercayaan Konsumen pada Produk UMKM di Desa Jerukwangi. *Welfare: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(4), 728–732.
- Arifandy, F. P., Norsain, N., & Firmansyah, I. D. (2020). Peran Koperasi Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Nelayan: Perspektif Modal Kerja. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 3(1), 118–132.
- Arleiny, A., Rahmawati, M., Wibisono, G. H., Alfarizi, M. R., & Farros, M. S. (2023). Strategi Bernavigasi Aman Sesuai Jalur Penangkapan Ikan dan Meningkatkan Keselamatan Pelayaran di Pantai Pondok Dadap Malang: Safe Navigation Strategy According to Fishing Routes and Improving Shipping Safety at Pondok Dadap Beach, Malang. *NaCosVi: Polije Proceedings Series*, 66–71.
- Cornwall, A., & Jewkes, R. (1995). What is participatory research? *Social Science & Medicine*, 41(12), 1667–1676.
- Etzkowitz, H., & Leydesdorff, L. (2000). The dynamics of innovation: from National Systems and “Mode 2” to a Triple Helix of university–industry–government relations. *Research Policy*, 29(2), 109–123.
- Fajriando, H. (2015). Partisipasi Masyarakat Nelayan di Sumatera Utara dalam Pembuatan Kebijakan Ditinjau dari Perpektif Hak Atas Pembangunan. *Jurnal Hak Asasi Manusia Volume*, 6(1).
- Hardianti, S. (2017). Partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur desa (program alokasi dana desa di Desa Buntongi Kecamatan Ampana Kota). *Katalogis*, 5(1).
- Ismail, I., Ulat, M. A., Muhfizar, M., Mustasim, M., & Poltak, H. (2021). Aplikasi Analytical Hierarchy Process: Sistem Pendukung Keputusan untuk Seleksi Desa Inovasi di Wilayah Sorong. *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia*, 26(4), 530–536.
- Kiswanto, K., & Andi, A. (2017). Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Kartu

- Nelayan Untuk Masyarakat Kabupaten Bangka Barat Berbasis Desktop Studi Kasus: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka Barat. *Jurnal Sisfokom (Sistem Informasi Dan Komputer)*, 6(2), 152–163.
- Kombongan, H. (2017). *Kajian Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan Tradisional Pulau Raam Dalam Mengidentifikasi Program dan Kegiatan Affirmatif dalam Mengakselerasi Peningkatan Kesejahteraan Nelayan*.
- Kusumaputra, A. (2017). Optimalisasi Pembangunan Ekonomi Nasional Melalui Otonomi Desa. *Perspektif*, 22(1), 55–65.
- Larasati, R. F., Bay, A. D. B. B., Hawati, H., Putra, A., Aini, S., & Rahmatang, R. (2024). Penanganan Ikan Hasil Tangkapan Pada KMN. Dua Putri 02 di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kendari, Sulawesi Tenggara. *Jurnal Perikanan Unram*, 14(1), 111–120.
- Mitra, A. (2021). Efektifitas Pelaksanaan Program Penyuluhan Perikanan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Desa Pulau Sarok, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian [JIMTANI]*, 1(2).
- Mulyana, N., Fauziyyah, H., & Resnawaty, R. (2017). Pengembangan ekonomi lokal Jatinangor melalui wisata edukasi. *Share Social Work Journal*, 7(1), 115–123.
- Nikmatul Masrurroh, S. H. I., & Parnomo, A. (2018). *Menggali potensi Desa berbasis ekonomi kerakyatan*. Jakad Media Publishing.
- Paulina Sulas, N. (2022). *Analisis Metode Cold Chain Dalam Menjaga Kualitas Produk Frozen Food*. Politeknik Negeri Jakarta.
- Pertiwi, Q. M., & Handayani, W. (2023). Analisis Manajemen Risiko Penerapan Cold Chain System Pengolahan Ikan Terinasi dengan Integrasi Metode Analytical Process Network (ANP) dan Failure Mode and Effect Analysis (FMEA). *Briliant: Jurnal Riset Dan Konseptual*, 8(1), 205–217.
- Pioh, A., Waworundeng, W., & Pangemanan, F. (2020). EVALUASI KEBIJAKAN KARTU NELAYAN DI KOTA MANADO (Studi Kasus di Kelurahan Sindulang I Kecamatan Tuminting). *JURNAL EKSEKUTIF*, 2(5).
- Ratna, R., Sulfiana, S., Arzad, M., Sangaji, R., Muna, M., Anwar, A., Kamaluddin, K., & Fahrizal, A. (2023). Pengembangan Ekonomi Wanita Nelayan Pesisir Pantai Pulau Raam Melalui Pengolahan Produk Perikanan. *Abdimas: Papua Journal of Community Service*, 5(2), 28–34.
- Sapthu, A. (2023). Listrik dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Maluku. *Jurnal Cita Ekonomika*, 17(2), 199–207.
- Septia, E., & Pebriyenni, P. (2019). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Bendung Air Timur. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 7(2), 129–135.
- Sujarweni, V. W. (2020). *Metodologi Penelitian*. Pustaka Baru Press.
- Sukri, S., Kasih, D., Afriyani, M. P., Rinawati, R., Efendi, S., Saputra, E., & Era, N. (2023). Sosialisasi dan Pemetaan Potensi Desa Sebagai Arah Pembangunan Yang Berkelanjutan. *JPMA-Jurnal Pengabdian Masyarakat As-Salam*, 3(1), 19–27.
- Syafitri, S., Metusalach, M., & Fahrul, F. (2016). Studi kualitas ikan segar secara organoleptik yang dipasarkan di Kabupaten Jeneponto. *Jurnal IPTEKS Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan*, 3(6).
- Tasmil, T. (2015). Penerapan Model TAM untuk Menilai Tingkat Penerimaan Nelayan terhadap Penggunaan GPS. *Pekommas*, 18(3), 222361.
- Tedyyana, A., Ratnawati, F., & Danuri, D. (2023). Platform Monitoring Berbasis Web untuk Sistem Stabilitas dan Pelacakan Kapal Nelayan. *Digital Zone: Jurnal Teknologi Informasi Dan Komunikasi*, 14(2), 168–178.